

Krisis Integritas Ilmiah di Tengah Kepentingan Politik: Tinjauan Etika Penelitian Kontemporer

Natasya¹, Sri Minarti²

^{1,2}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro
natashatbn27@gmail.com¹, minarti@sunan-giri.ac.id²

Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

Keywords:

scientific integrity,
politicization of science,
educational ethics, evidence-
based policy, public trust

ABSTRACT

The crisis of scientific integrity in the midst of political interests has become a serious challenge in the world of contemporary education and research. This article aims to analyze forms of politicization of science, its impact on public trust and evidence-based policy, and examine it from the perspective of educational ethics. This research uses a qualitative approach with the type of library research through the analysis of various recent scientific literature. The results of the study show that the politicization of science occurs in the form of control of research agendas, data manipulation, restrictions on academic freedom, and the use of science as a tool of power legitimization. The impact is a decline in public trust in science and a weakening of evidence-based policies. From an ethical perspective, scientific distortion cannot be justified either deontologically or utilitarianly because it violates the moral obligations of scientists and harms society at large. Therefore, the restoration of scientific autonomy is a strategic solution through the separation of political interests from the scientific process, the application of transparency, and the protection of academic freedom. This research emphasizes the importance of strengthening educational ethics as a foundation in maintaining scientific integrity in the contemporary era.



Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

Kata kunci:

integritas ilmiah,
politisasi sains, etika
pendidikan, kebijakan
berbasis bukti,
kepercayaan publik

ABSTRAK

Krisis integritas ilmiah di tengah kepentingan politik menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan dan penelitian kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk politisasi sains, dampaknya terhadap kepercayaan publik dan kebijakan berbasis bukti, serta menelaahnya dalam perspektif etika pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis berbagai literatur ilmiah terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa politisasi sains terjadi dalam bentuk kontrol agenda penelitian, manipulasi data, pembatasan kebebasan akademik, serta penggunaan ilmu pengetahuan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sains dan melemahnya kebijakan berbasis bukti. Dalam perspektif etika, distorsi ilmiah tidak dapat dibenarkan baik secara deontologis maupun utilitarian karena melanggar kewajiban moral ilmuwan dan merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, pemulihan otonomi sains menjadi solusi strategis melalui pemisahan kepentingan politik

dari proses ilmiah, penerapan transparansi, serta perlindungan terhadap kebebasan akademik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan etika pendidikan sebagai landasan dalam menjaga integritas ilmiah di era kontemporer.



Corresponding Author:

Natasya
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Email: natashatbn27@gmail.com

PENDAHULUAN

Integritas ilmiah merupakan fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pendidikan, yang mencakup nilai-nilai kejujuran, objektivitas, transparansi, dan tanggung jawab akademik. Dalam konteks pendidikan kontemporer, keberadaan integritas ilmiah menjadi semakin penting di tengah kompleksitas tantangan global, terutama dengan meningkatnya keterlibatan kepentingan politik dalam dunia pendidikan dan penelitian. Politik sebagai bagian dari sistem kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menentukan arah pendidikan, namun intervensi yang berlebihan berpotensi menggeser orientasi ilmu pengetahuan dari pencarian kebenaran menjadi alat legitimasi kepentingan tertentu.

Fenomena krisis integritas ilmiah saat ini ditandai dengan meningkatnya berbagai bentuk pelanggaran etika akademik, seperti manipulasi data, plagiarisme, publikasi yang bias, hingga pembatasan kebebasan akademik. Laporan dari (UNESCO, 2021) menegaskan bahwa integritas ilmiah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan, terutama di tengah maraknya disinformasi di era digital. Selain itu, studi yang dilakukan oleh (Research, 2022) menunjukkan adanya peningkatan kekhawatiran global terhadap praktik pelanggaran etika penelitian yang dipengaruhi oleh tekanan eksternal, termasuk kepentingan politik dan institusional.

Meskipun berbagai kajian tentang etika penelitian telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan dalam memahami secara komprehensif hubungan antara kepentingan politik dan krisis integritas ilmiah dalam perspektif etika pendidikan kontemporer. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek teknis pelanggaran etika, tanpa mengkaji faktor struktural yang melatarbelakangi, seperti tekanan kebijakan, kepentingan kekuasaan, dan orientasi pragmatis dalam pendidikan. Padahal, menurut (Development, 2022) sistem pendidikan modern menghadapi tantangan besar dalam menjaga independensi akademik di tengah meningkatnya intervensi kebijakan yang bersifat politis.

Urgensi pembahasan ini semakin menguat seiring dengan perkembangan teknologi digital yang mempercepat produksi dan distribusi informasi, tetapi tidak selalu diimbangi dengan peningkatan literasi etika akademik. Kondisi ini berpotensi memperburuk krisis integritas ilmiah apabila tidak diantisipasi melalui penguatan etika pendidikan yang adaptif dan kontekstual. Laporan (Bank, 2020) juga menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh aspek kognitif, tetapi juga oleh integritas dan karakter yang dibangun melalui proses pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada analisis hubungan

antara kepentingan politik dan krisis integritas ilmiah dalam perspektif etika pendidikan kontemporer. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk intervensi kepentingan politik dalam praktik pendidikan dan penelitian, dampaknya terhadap integritas ilmiah, serta peran etika pendidikan dalam merespons krisis tersebut. Adapun tujuan ilmiah dari penulisan ini adalah untuk menganalisis bentuk intervensi politik dalam dunia akademik, mengkaji dampaknya terhadap integritas ilmiah, serta menelaah peran etika pendidikan kontemporer sebagai landasan dalam memperkuat nilai-nilai integritas dalam praktik pendidikan dan penelitian di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena krisis integritas ilmiah dalam kaitannya dengan kepentingan politik melalui analisis literatur yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman konseptual dan interpretatif terhadap berbagai teori, kebijakan, serta temuan penelitian yang berkaitan dengan etika pendidikan dan integritas ilmiah dalam konteks kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi, laporan lembaga internasional, serta artikel ilmiah terbaru yang membahas integritas ilmiah, etika penelitian, dan kebijakan pendidikan, seperti publikasi dari UNESCO, Organisation for Economic Co-operation and Development, serta jurnal-jurnal bereputasi yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, hasil penelitian terdahulu, serta sumber literatur lain yang mendukung analisis penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini meliputi pencarian sumber melalui database jurnal ilmiah, laporan resmi, serta publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik integritas ilmiah dan etika pendidikan. Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kebaruan sumber, dengan mengutamakan referensi dalam lima tahun terakhir.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan model analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah informasi yang relevan dengan fokus kajian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan pemahaman. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif, dengan mengaitkan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai krisis integritas ilmiah di tengah kepentingan politik dalam perspektif etika pendidikan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Hasil kajian menunjukkan bahwa politisasi sains dalam pendidikan dan penelitian kontemporer muncul dalam beberapa bentuk utama, yaitu kontrol agenda penelitian oleh kepentingan politik, manipulasi atau bias dalam penyajian hasil penelitian, pembatasan kebebasan akademik, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai alat legitimasi kebijakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ilmiah tidak sepenuhnya bebas nilai, melainkan rentan terhadap intervensi kekuasaan yang dapat menggeser orientasi penelitian dari pencarian kebenaran menjadi kepentingan pragmatis.

Fenomena tersebut diperkuat oleh laporan (UNESCO, UNESCO Recommendation on Open Science, 2021) yang menekankan pentingnya menjaga independensi ilmiah di tengah tekanan eksternal, serta (Elsevier, 2023) yang mengidentifikasi meningkatnya bias publikasi dan konflik kepentingan dalam praktik penelitian global. Dalam konteks empiris, politisasi sains terlihat pada penanganan pandemi COVID-19, di mana kebijakan publik di beberapa negara tidak sepenuhnya berbasis bukti ilmiah, melainkan dipengaruhi pertimbangan politik, sebagaimana dilaporkan oleh (Organization, 2022) Selain itu, isu perubahan iklim juga menunjukkan adanya distorsi informasi ilmiah akibat kepentingan non-ilmiah, sebagaimana ditegaskan oleh (Change, 2021).

Dalam perspektif etika, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori deontologi yang menekankan kewajiban moral dalam menjaga kejujuran ilmiah, utilitarianisme yang menuntut kebermanfaatannya bagi kepentingan publik, serta etika kebajikan yang menekankan integritas dan tanggung jawab ilmuwan. Kajian dari European (Commission, 2021) juga menegaskan pentingnya penguatan budaya integritas sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas tantangan dalam dunia akademik.

Dengan demikian, politisasi sains merupakan fenomena nyata yang berdampak sistemik terhadap integritas ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika pendidikan sebagai landasan dalam menjaga independensi, objektivitas, dan tanggung jawab ilmiah di tengah dinamika kepentingan politik.

b. Pembahasan

Tinjauan Deontologi dan Utilitarianisme Terhadap Distorsi Ilmiah

Distorsi ilmiah yang terjadi akibat politisasi sains, khususnya dalam bentuk manipulasi data dan bias penelitian, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip etika akademik. Dalam perspektif deontologi, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun karena bertentangan dengan kewajiban moral ilmuwan untuk menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Etika keilmuan menempatkan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sebagai prinsip utama dalam penelitian, sehingga setiap bentuk manipulasi data merupakan bentuk pengingkaran terhadap hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri (Pratiwi, 2024). Dengan demikian, dalih kepentingan politik tidak dapat dijadikan pembenaran, karena secara moral tindakan tersebut tetap salah dan melanggar integritas ilmiah.

Lebih lanjut, dalam perspektif utilitarianisme, distorsi ilmiah juga tidak dapat dibenarkan karena dampaknya yang merugikan masyarakat luas dalam jangka panjang. Kebijakan yang didasarkan pada data yang tidak valid berpotensi menghasilkan keputusan yang keliru dan merugikan publik secara sistemik. Praktik komunikasi yang tidak jujur, termasuk penyebaran informasi yang menyesatkan dalam konteks politik, terbukti dapat menurunkan kepercayaan publik dan memperburuk kualitas pengambilan keputusan masyarakat (Mahardhika, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kebohongan ilmiah demi stabilitas politik jangka pendek justru berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh

lebih besar di masa depan.

Selain itu, rendahnya integritas dalam praktik politik dan akademik juga mencerminkan krisis moral yang lebih luas, di mana nilai-nilai etika tidak lagi menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa menurunnya integritas dalam kehidupan publik berkontribusi terhadap melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan sistem sosial (Ernita, 2024). Dalam konteks ini, distorsi ilmiah tidak hanya berdampak pada dunia akademik, tetapi juga pada stabilitas sosial dan kualitas demokrasi.

Dengan demikian, baik dari sudut pandang deontologi maupun utilitarianisme, manipulasi data demi kepentingan politik merupakan tindakan yang tidak memiliki legitimasi etis. Deontologi menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar kewajiban moral ilmuwan, sementara utilitarianisme menunjukkan bahwa dampaknya merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, integritas ilmiah harus diposisikan sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dalam praktik pendidikan dan penelitian.

Ancaman Terhadap Public Trust dan Kebijakan Berbasis Bukti

Krisis integritas ilmiah yang dipicu oleh politisasi sains membawa dampak serius terhadap kepercayaan publik (*public trust*) dan keberlangsungan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Ketika hasil penelitian dimanipulasi atau dipolitisasi, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sains sebagai sumber kebenaran objektif. Kondisi ini mendorong munculnya sikap apatis, skeptisisme berlebihan, hingga penolakan terhadap temuan ilmiah, terutama ketika masyarakat melihat adanya inkonsistensi antara fakta ilmiah dan kebijakan yang diambil. Fenomena ini diperkuat oleh temuan bahwa rendahnya integritas dalam komunikasi publik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan otoritas ilmiah (Mahardhika, Etika Komunikasi Politik pada Pemilihan Umum Terkait Hoax Tahun 2024, 2024).

Lebih lanjut, menurunnya kepercayaan publik berdampak langsung pada efektivitas kebijakan publik. Kebijakan yang seharusnya berbasis data dan bukti ilmiah menjadi rentan ditolak atau diabaikan oleh masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat implementasi program strategis, seperti kebijakan kesehatan, pendidikan, maupun lingkungan. Selain itu, distorsi ilmiah juga berpotensi merusak proses perumusan kebijakan itu sendiri, karena keputusan yang diambil tidak lagi didasarkan pada data yang valid, melainkan pada kepentingan politik jangka pendek. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berisiko menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah melemahnya legitimasi institusi pendidikan dan penelitian sebagai penjaga kebenaran ilmiah. Ketika praktik akademik dipersepsikan tidak lagi independen, maka posisi sains sebagai dasar pengambilan keputusan publik menjadi terdegradasi. Hal ini menunjukkan bahwa krisis integritas ilmiah tidak hanya berdampak pada ranah akademik, tetapi juga pada stabilitas sosial dan kualitas tata kelola negara. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan publik dan penguatan kebijakan berbasis bukti menjadi agenda mendesak yang harus dilakukan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen terhadap etika ilmiah dalam setiap proses penelitian dan pengambilan kebijakan.

Pemulihan Otonomi Sains Sebagai Solusi Etis dan Struktural

Dalam konteks Indonesia, pemulihan otonomi sains juga harus selaras dengan prinsip moderasi beragama yang ditetapkan oleh Kementerian agama melalui pepres No. 58 Tahun 2023. Prinsip *I'tidal* menuntut ilmuwan untuk tetap objektif meskipun berada dibawah tekanan politik. Moderasi beragama bukan hanya soal kerukunan umat, tetapi juga mencakup moderasi dalam berfikir dan bertindak. Integritas ilmiah diposisikan sebagai Upaya menjauhi titik ekstrem kepentingan pragmatis demi menjaga kemashlahatan bangsa.

Pemulihan integritas ilmiah di tengah politisasi sains memerlukan langkah strategis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural. Salah satu upaya utama adalah pemisahan tegas antara penyandang dana (terutama yang memiliki kepentingan politik) dengan otoritas penarikan kesimpulan ilmiah. Independensi ini penting agar proses produksi pengetahuan tetap berlandaskan metode ilmiah yang objektif, bukan kepentingan eksternal. Integritas ilmiah menuntut adanya kebebasan akademik dan otonomi dalam penelitian sebagai prasyarat utama tercapainya kebenaran ilmiah (Pratiwi, 2024).

Selain itu, penerapan transparansi radikal menjadi langkah penting dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap sains. Transparansi tidak hanya mencakup keterbukaan data, tetapi juga proses penelitian, sumber pendanaan, dan potensi konflik kepentingan. Keterbukaan ini memungkinkan adanya kontrol sosial dan verifikasi kolektif dari komunitas ilmiah, sehingga dapat meminimalisasi praktik manipulasi atau distorsi ilmiah. Prinsip keterbukaan ini sejalan dengan rekomendasi UNESCO (2021) yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik penelitian modern.

Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi ilmuwan yang menyuarakan kebenaran merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas ilmiah. Dalam banyak kasus, ilmuwan yang mengungkap fakta yang bertentangan dengan kepentingan politik justru menghadapi tekanan dan marginalisasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang menjamin perlindungan terhadap *whistleblower* serta kebebasan akademik. Tanpa perlindungan tersebut, keberanian moral ilmuwan akan terhambat, sehingga kebenaran ilmiah sulit terungkap secara objektif (Ernita, 2024).

Dengan demikian, pemulihan otonomi sains harus dilakukan melalui kombinasi antara independensi kelembagaan, transparansi menyeluruh, dan perlindungan terhadap ilmuwan. Upaya ini tidak hanya penting secara etis, tetapi juga secara struktural untuk mengembalikan fungsi sains sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada kepentingan publik.

KESIMPULAN

Krisis integritas ilmiah akibat politisasi sains menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan semakin rentan terhadap intervensi kekuasaan, baik melalui kontrol agenda riset, manipulasi data, maupun pembatasan kebebasan akademik. Dampaknya tidak hanya merusak kredibilitas akademik, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik serta mengancam keberlangsungan kebijakan berbasis bukti. Secara etis, distorsi ilmiah tidak dapat dibenarkan. Dalam perspektif deontologi, tindakan tersebut melanggar kewajiban moral ilmuwan, sedangkan dalam utilitarianisme, dampaknya merugikan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, pemulihan otonomi sains menjadi keharusan melalui pemisahan kepentingan politik dari proses ilmiah, penerapan transparansi, serta perlindungan terhadap kebebasan akademik. Dengan demikian, penguatan etika pendidikan dan integritas ilmiah merupakan kunci untuk menjaga sains tetap berorientasi pada kebenaran dan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank, W. (2020). *Realizing the Future of Learning: From Learning Poverty to Learning for Everyone, Everywhere*. Washington, DC.
- Change, I. P. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Commission, E. (2021). *Ethics and Integrity in Research: A Policy Report*. Brussels: European Commission.
- Development, O. f.-o. (2022). *Education Policy Outlook 2022*. Paris: OECD Publishing.
- Elsevier. (2023). *Research Integrity and Ethics in Scientific Publishing*. Amsterdam: Elsevier.
- Ernita, T. S. (2024). *Etika Anti Korupsi dan Integritas Kehidupan Politik*. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
- Mahardhika, R. A. (2024). *Etika Komunikasi Politik pada Pemilihan Umum Terkait Hoax Tahun 2024*. Jurnal Sinergi.
- Organization, W. H. (2022). *Managing the COVID-19 Infodemic: Promoting Healthy Behaviours and Mitigating the Harm from Misinformation and Disinformation*. Geneva: WHO.
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama Pratiwi, R. J. (2024). *Peranan Etika Keilmuan dalam Membentuk Penelitian yang Bertanggung Jawab*. Jurnal Cendikia.
- Research, N. (2022). *Research integrity: Understanding our shared responsibility*. Nature Human Behaviour.
- Steneck, N. H. (2006). *Fostering integrity in research: Definitions, current knowledge, and future directions*. *Science and Engineering Ethics*, 12(1), 53-74.
- UNESCO. (2021). *Recommendation on Open Science*. Paris: UNESCO. UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. Paris: UNESCO Publishing.
- Ziman, J. (2000). *Real Science: What It Is and What It Means*. Cambridge: Cambridge University Press.